



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN MILITER TINGGI - III SURABAYA  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AGUSTONO
2. Jabatan : WAKIL KEPALA
3. NHK : 511265

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 539.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 198.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 341.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 72.700.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 3.700.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG UF81 GRAND AT Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 25.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 636.700.000**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 636.700.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.